

MALUKU UTARA DALAM RELASI HISTORIS

Junaib Umar, S.S., M.Si.
Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu budaya
Email: junaibumar18@gmail.com

ABSTRAK

Meskipun eksistensi Maluku Utara telah terbangun di masa lalu, berbagai perubahan besar dalam kehidupan sosial terbentuk pada abad ke-19. Melalui perubahan pemerintahan berdampak pada modernisasi melalui kebijakan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dampak tersebut adalah pembentukan sistem negara kolonial, penghapusan perbudakan, dan pemberlakuan pajak uang. Situasi ini berpengaruh terhadap system politik dan social di Indonesia modern.

Kata kunci: Negara Kolonial, modernisasi

ABSTRACT

Tough existence of North Maluku had been build in the past, various social change formed in 19th century. Government system change impact to modernization by policy and its impacts for society. Impacts are the formation of colonial state system, slavery abolition, and taxation of money. Its impact to political and social system in modern Indonesia.

Keywords: colonial state, modernization

Pendahuluan

Kompleksitas dan keberagaman manusia Indonesia berpengaruh terhadap permasalahan kesejarahan terkait penulisan dan penelitian kesejarahan di Indonesia Timur. Peran masa lalu Indonesia, dalam hal ini eksistensi entitas sosio, politik, dan kultural tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kekuasaan kolonial Belanda. Mau tidak mau ataupun suka tidak suka, kolonialisme yang telah berjalan selama beratus-ratus tahun di Indonesia merupakan realitas yang tak terbantahkan.

Kolonialisme Belanda sebagai suatu entitas, juga menampilkan identifikasi atas subyek tertentu. Kolonialisme tidak hanya merupakan seperangkat metode atau sistem pemerintahan yang hanya terfokus dalam persoalan kekuasaan belaka, tetapi juga membawa berbagai identitas kultural dan sosial dari negara kolonial tersebut. Meskipun kini di Indonesia cita rasa kolonialisme Belanda telah benar-benar menghilang, tidak dapat diabaikan lagi bahwa kolonialisme Belanda memberi pengaruh mendalam yang secara tidak langsung memberi landasan bagi negara Indonesia modern.

Artikel ini sendiri akan membahas tentang bagaimana membaca Maluku Utara dalam relasi masa lalu terkait dengan kolonialisme Belanda. Relasi Maluku Utara sebagai bagian dari Hindia Belanda, walau memiliki unsur general tetapi ada beberapa karakteristik pada wilayah

buitenbezittingen atau wilayah luar Jawa khususnya Indonesia Timur. Hal ini disebabkan oleh karakteristik unik ilmu kesejarahan yang menunjukkan adanya dinamika sosio politik tersendiri dibandingkan wilayah lainnya.

Korelasi tersebut tidak terlepas dari pemahaman atas kontinuitas sejarah dimana suatu periode merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari periode berikutnya. Salah satu hal mendasar dalam perubahan sosial kultural masyarakat Indonesia berkenaan dengan sistem pemerintahan barat yang hingga saat ini diaplikasikan ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta aspek demografis yang menjadi penyebab mengapa Indonesia sendiri, khususnya Jawa, menempatkannya salah satu wilayah penduduk terpadat di dunia. Untuk pemahaman atas hal tersebut setidaknya berupaya memahami mengapa berbagai sumber-sumber data kolonial masih relevan dijadikan salah satu rujukan penting dalam membaca kembali sejarah Maluku Utara secara holistic dan implentatif dalam pengembangan keilmuan kesejarahan.

Modernisasi Pemerintahan di Timur Indonesia (Maluku Utara)

Pemaknaan atas modernisasi memang seringkali menimbulkan istilah rancu dan tumpang tindih sehingga sulit sekali membedakan antara makna modern dalam pengertian sebagai suatu pemahaman atas rasionalisasi dalam bertindak dan berperilaku dengan westernisasi. Meskipun demikian, masyarakat barat sebagai pencetus awal modernisasi sesungguhnya telah melalui berbagai proses dalam berbagai aspeknya guna mewujudkan suatu sistem organisasi sosial politik tentu merupakan awal dari bagaimana evolusi sistem pemerintahan dalam kerangka rasional dan terukur. Kondisi ini pula yang kemudian terjadi pada berbagai perubahan sistem pemerintahan di Maluku Utara. Perubahan tersebut menyebabkan adanya kemunculan hal baru sistem tata pemerintahan sebagai suatu organisasi sosial di dalam masyarakat Maluku Utara.

Tulisan ini tidak akan terlalu membahas tentang bagaimana perubahan sistem pemerintahan kolonial berpengaruh atas kesultanan. Berbagai tulisan dan penelitian yang membahas tentang berbagai perubahan sistem politik dalam konteks kesultanan telah mengulas secara detail dari banyak sudut pandang sehingga akan terasa mubazir jika hanya terfokus pada kesultanan semata. Saya akan memberi uraian ringkas tentang gambaran atas berbagai perubahan di antara masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk dan menyebar di seluruh penjuru hutan dan pesisir di Maluku Utara walaupun tentu di banyak ulasan melekatkan peran dan kedudukan kesultanan dalam perspektif berbeda.

Salah satu hal penting yang diulas dalam pembahasan pertama adalah bagaimana pedesaan Maluku Utara yang telah hidup dalam organisasi sosial organis dan naturalistik selama ribuan tahun telah mengalami perubahan ekstrim selama dua abad terakhir atau tepatnya saat pendirian pemerintah kolonial Belanda sebagai dampak traktat London 1824. Berbeda dengan berbagai pemerintahan sebelumnya, modernisasi serta sentralisasi kekuasaan dan administrasi dalam satu

sistem negara nasional yang dibangun oleh pemerintahan kolonial sejak pertengahan abad ke-19, membawa perubahan pada hubungan baru relasi negara dan rakyat di Maluku Utara.

Sebagaimana telah umum diketahui, relasi kekuasaan kesultanan dengan rakyatnya memiliki relasi patron-klien terkait hubungan resiprokal antara pertukaran komoditi konsumsi dengan jaminan sistem keseimbangan politik dan keamanan di pedesaan. Hal ini pula yang mendasari berdirinya kekuasaan kesultanan Ternate dan Tidore dalam relasi antara sultan dan ibukota beserta rakyatnya yang tersebar dalam kelompok-kelompok sosial atas dasar klan-klan (*extended family*) berbasis kekerabatan. Seringkali konflik antar desa juga berujung pada perbedaan persekutuan di tingkat regional dimana klan-klan yang tergabung dalam persekutuan desa dan saling bertikai akan menghadapi kompetitornya dalam persekutuan dengan kesultanan yang memiliki sumber daya politik, ekonomi, dan militer untuk konstruksi politik secara regional. Tentunya ikatan persekutuan dari konflik lokal tersebut akan saling berbeda pada tiap-tiap pihak yang berkonflik dan pada saat bersamaan pula hal ini memiliki hubungan paralel dengan kompetisi di antara kedua kesultanan, Ternate dan Tidore, yang tidak berujung itu. Beberapa sumber Belanda menjelaskan bagaimana serbuan kesultanan Tidore dan sekutu-sekutunya pada beberapa desa berbahasa Austronesia, dimana dengan tegas mengacu pada desa Gita di bagian tengah pesisir barat Halmahera, menyebabkan terjadinya migrasi masyarakat yang tergabung dalam klan desa Gita ini ke pulau Makian.¹ Kondisi tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa konstelasi politik secara menyeluruh di Maluku Utara lebih menunjukkan karakteristik konfederasi politik negara desa di tingkat lokal berjalan beriringan dengan kompetisi di tingkat regional antara kesultanan Ternate dan Tidore.

Pemahaman resiprokal pada kedua kesultanan di Maluku Utara ini sendiri tidak serta merta dikaitkan dengan feodalisme dalam nuansa totaliter dan despotisme. Berbagai sumber Belanda memang menunjukkan bagaimana wujud dari sistem *herendiensten* atau kerja wajib dan upeti dalam konteks yang mungkin tidak sesuai dengan nilai dan etika modernitas, tetapi hal ini tentunya harus dipahami berdasarkan konteks dan nilai lokal. Tuntutan kesultanan atas imbalannya sebagai patron pada pelayanan dan upeti dari warganya juga tidak dikenakan secara individual, melainkan secara komunal dan disesuaikan berdasarkan pada keunggulan dan kemampuan dari masing-masing komunitas di pedesaan.² Barangkali untuk lebih mudahnya dapat kita sejajarkan dengan *sistem noken* sebagai sistem *political representative* seperti yang berlaku di Papua saat ini.

Beberapa penelitian antropologi dari Leiden Universiteit menjelaskan tentang bagaimana relasi politik masyarakat lokal dan kesultanan dimaknai dalam sudut pandang masyarakat pribumi pada

¹ Sussana Grazia Rizzo. *From Paradise Lost to Promise Land, Christianity and the Rise of Papuan Nationalism*, Disertasi University of Wollongong, 2004.

² *Ternate: MvO J. H. Tobias (1857) dan C. Bosscher (1859)* (Jakarta: ANRI, 1980).

periode tersebut.³ Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya koordinasi politik di masing-masing kelompok politik di tingkat lokal oleh tiap-tiap kesultanan sehingga menjamin keamanan politik di antara masyarakat pedesaan serta peredaran berbagai barang konsumsi impor. Pemahaman tersebut pula yang mendasari bagaimana upeti atas cengkeh sebelum politik ekstirpasi di abad ke-17 memungkinkan keseimbangan dan kontinuitas antara kepentingan ekonomi kesultanan dengan distribusi barang-barang konsumsi impor di pedesaan.

Selain itu, dalam persoalan kerja wajib, ada sudut pandang tersendiri bagi masyarakat lokal dalam memahami makna kerja wajib pada kedudukan sosial mereka di pedesaan. Seringkali kita yang hidup dalam dunia kekinian dengan berbagai orientasi modernitas memaknai kerja wajib sebagai eksploitasi feodalisme. Hal itu juga sebagaimana terjadi pada para pejabat kolonial Belanda yang memandang bahwa eksploitasi kerja wajib oleh kesultanan bagi rakyatnya merupakan penghambat dan pemicu dari berbagai keresahan sosial. Meskipun demikian, sumber-sumber kolonial masih menjadi satu-satunya rujukan guna melihat fenomena kerja wajib di kesultanan pada masa lalu, meskipun harus ditanggapi dengan paradigma berbeda. Salah satunya adalah *Memorie van Overgave Resident Ternate* di pertengahan abad ke-19 yaitu C. Bosscher secara detail memberi daftar yang cukup mengagumkan tentang kerja wajib, dan juga upeti, dari tiap-tiap komunitas pedesaan di Maluku Utara.⁴

Kajian antropologi kesejarahan milik seorang pakar dari Belanda, Leontine Visser, memberi gambaran berbeda atas fenomena kerja wajib itu sendiri pada masyarakat etnis Sahu. Beliau menunjukkan bahwa ada kontruksi kultural mengenai di masa lalu terkait perspektif supranatural bagi mereka yang menjalani kerja wajib untuk kesultanan. Selain itu kerja wajib juga berguna sebagai alat distribusi bagi persebaran barang-barang konsumsi impor di pedesaan pada mereka yang memperoleh hadiah setelah melakukan pelayanan untuk kesultanan dan kerabatnya. Dengan kata lain, kerja wajib dan upeti bukan hanya berperan sebagai sistem dan perangkat ekonomi masyarakat feodal tetapi juga sebagai kontrol atas stratifikasi dan mobilitas sosial di masa feodal.⁵

Contoh kecil pada pemahaman kerja wajib dan upeti di atas tentu menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam melihat modernisme masyarakat Belanda di masa tersebut, dan juga masyarakat Indonesia pada saat ini. Harus kita akui bahwa dunia tradisional dan feodal di

³ Beberapa penelitian tersebut adalah Ch. F. van Fraassen, 1987, *Ternate, De Molukken en De Indonesische Archipel*, Van Soa Organisatie en Vierdeling: Een Studie van Traditionele Samenleving en Cultuur en Indonesia, Deel I & II, Disertasi Universiteit Leiden; L. E. Visser ed., *Halmahera and Beyond, Social Science Research in Moluccas*. Leiden: KITLV; Baker, James N. 1994. "Ancestral Traditions and State Categories in Tidorese village Society" dalam L. E. Visser ed., *Halmahera and Beyond, Social Science Research in Moluccas*. Leiden: KITLV; Barraud, C. & J. Platenkamp, "Rituals and the comparison of societies" dalam BKI, *Rituals and Socio-Cosmic Order in Eastern Indonesian Societies, Part II Maluku*, No. 146, 1990, Leiden, dll.

⁴ *Ternate: MvO J. H. Tobias (1857) dan C. Bosscher (1859)* (Jakarta: ANRI, 1980), hal. 175

⁵ Leontine Visser. 1989. *My Rice is My Child, Social and Territorial Aspects of Swidden Cultivation in Sahu, Eastern Indonesia*, Translated by Rita DeCoursey. Dordrecht-Holland/Providence-USA: Forris Publications.

Maluku Utara memiliki persepektif berbeda dalam menanggapi berbagai fenomena, dan tradisionalitas tersebut telah menghilang pada hampir seluruh masyarakat tradisional.

Titik perubahan atas hal tersebut terkait dengan adanya perubahan sistem pemerintahan di Maluku Utara. Hal ini disebabkan oleh relasi kuasa sebagai kontrol atas nilai sosial budaya yang berlaku bagi masyarakat sehingga saat terjadi pergeseran dan perubahan pemegang kuasa maka sebagian besar sistem sosial budaya masyarakat tersebut mengalami pergeseran.

Upaya Belanda membentuk negara nasional *Nederlandsch Indie*, yang dalam hal ini juga termasuk Maluku Utara, berimplikasi pada revolusi sistem ketatanegaraan khususnya di kawasan Maluku Utara. Pergeseran dan reposisi kedudukan kekuasaan sultan berdampak pada perubahan tatanan sosial di Maluku Utara. Pembentukan negara nasional *Nederlandsch Indies* sendiri tidak terjadi secara instan dan singkat tetapi melalui proses berkesinambungan selama puluhan tahun. Ada beberapa poin penting terkait dengan pemerintahan yang memiliki implikasi atas perubahan sosial di Maluku Utara yaitu penerapan pajak individual, penghapusan perbudakan, serta pembentukan tata kelola administrasi pemerintahan.

Penerapan pajak individual sebagai reformasi ekonomi politik di Maluku Utara sendiri memiliki dinamika yang sekiranya berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Pemberlakuan kebijakan pajak individual itu sendiri bukan merupakan suatu fenomena tunggal tetapi berkorelasi dengan berbagai peristiwa yang mendahuluinya. Pembukaan pelabuhan bebas di Ternate pada tahun 1848 hingga pelayaran honggi merupakan salah satu upaya konstruksi ekonomi nasional yang terpusat dan sistematis. Hal ini sangat efektif dalam mengurangi sumber daya politik kesultanan guna menghentikan dualisme pemerintahan. Sebagai contoh adalah pelayaran honggi kesultanan yang merupakan kelanjutan dari pelayaran kora-kora tradisional untuk menegakkan eksistensi kekuasaannya pada daerah-daerah yang belum ditaklukan atau vasal-vasal kesultanan yang melakukan pembangkangan dengan tidak menaati pembayaran upeti.⁶

Kondisi serupa juga berlaku pada penghapusan perbudakan di tahun 1860. Hal yang sebelumnya patut untuk dipahami adalah ada pemaknaan mendasar mengenai perbudakan itu sendiri dalam tatanan tradisional masyarakat feodal Maluku Utara dibandingkan dengan pemaknaan budak dalam perspektif Eropa. Sebagai contohnya, sejak abad ke-17 di kesultanan Ternate, perbudakan menjadi bagian institusional dari sistem ketatanegaraan dan sosial kesultanan akibat implikasi dari kemenangan perang dalam persekutuanannya dengan VOC menaklukan kerajaan Goa-Tallo di Sulawesi. Masifnya jumlah budak di Ternate menyebabkan kesultanan harus memberi ruang sosial politik bagi kelas budak tersebut. Hal ini menjadi alasan mengapa ada kategorisasi budak dengan strata sosial tersendiri. Bagi kategori budak yang ditangkap dan diperjualbelikan secara

⁶ Honggi merupakan armada pribumi yang telah lama ada sebelum kedatangan Eropa, yang terdiri dari sejumlah besar *kora-kora*. Orang Belanda menganggap hal ini sebagai *hofdienst* atau dinas istana. Ch. F. van Fraassen, *Ternate, op.cit.*, hal. 30; *Ternate: MvO J. H. Tobias dan C. Bosscher* (Jakarta: ANRI, 1980), hal. 178.

individual dan terbuka di pasar-pasar atau ruang publik merupakan status terendah tidak hanya di kalangan budak tetapi juga dalam strata sosial di Ternate dengan sebutan *ngongare*. Akan tetapi bagi budak yang memiliki kedekatan dan tugas pelayanan bagi sultan beserta anggota kerajaan lainnya, justru menempati kedudukan sosial yang cukup tinggi bahkan di antara masyarakat umum lainnya dengan berbagai hak dan keistimewaannya. Budak jenis ini disebut juga dengan *ngofangare*. Situasi tersebut menunjukkan ada tumpang tindih jika melihatnya dengan kerangka perspektif stratifikasi kesejarahan di Eropa. Di masa kesultanan Ternate, kaum budak tetap diberikan kebebasan dan kewenangan untuk mengurus diri mereka sendiri. Hal ini dikaitkan dengan keberadaan separuh waktu kerja mereka diperuntukan bagi pelayanan dan separuh waktu lainnya untuk kehidupan pribadi, termasuk berumah tangga dan kehidupan bersosial. Selain itu budak juga merupakan unsur sosial penting dalam konteks masyarakat tradisional di Kesultanan Ternate sebagai implementasi dari mobilisasi tenaga kerja baik guna kepentingan ekonomi, dan yang terpenting adalah militer.

Penghapusan perbudakan merubah sistem produksi dan tatanan sosial di dalam institusi dan kehidupan sosial kesultanan dan juga menutup adanya jaringan perdagangan budak yang banyak melibatkan kaum bangsawan dalam penyediaan sumber ekonomi.⁷ Pada masa itu penutupan akses ekonomi perbudakan menyebabkan banyak di antara elit-elit politik kehilangan sumber pendapatan dan jatuh miskin sehingga mendorong dan memberi ruang atas pecahnya perlawanan Dano Hassan.⁸

Puncak dari seluruh momen pembentukan negara nasional *Nederandsch Indie* di Maluku Utara adalah dengan reorganisasi pemerintahan di wilayah yang pada masa itu disebut sebagai karesidenan Ternate di bawah kuasa kolonial. Pemberlakuan kontrak pada tahun 1880 melalui keterlibatan langsung pemerintah kolonial di seluruh bidang kehidupan di Karesidenan Ternate.

Berbagai penelitian sejarah baru-baru ini banyak membahas tentang pembentukan administrasi kolonial dan dampaknya pada institusi kesultanan. Sejarawan lokal seperti karya saya pribadi, Adnan Amal, Umar Hi Rajab, dan beberapa akademisi sejarah Maluku Utara telah banyak membahas mengenai perubahan kekuasaan di dalam kesultanan.

Di sini akan memaparkan secara singkat mengenai pembentukan administrasi kolonial dalam dualisme sistem pemerintahan yang pada peralihan abad ke-20 mulai mendominasi dan menggeser kedudukan administrasi kesultanan. Hal ini diawali dari tahun 1824 dengan pendirian *gouvernement gouvernement* Maluku. Kedudukan Maluku Utara pada masa tersebut masih belum jelas. Meskipun ada pejabat setingkat residen, namun pemerintah tidak menetapkan wilayah Maluku Utara sebagai satuan pemerintah kolonial setingkat karesidenan. Beberapa pos

⁷ Christiaan Frans van Fraasen, *Ternate... Op.Cit.*, hal. 249.

⁸ Koloniaal Verslag 1877 (KV), hal. 28

pemerintah di daerah di luar ibukota Karesidenan Ternate juga masih hanya sebatas *posthouder* yang lebih berorientasi kepada militer seperti di Bicoli, Maba, Galela. Hanya terdapat sedikit *afdeeling* seperti Labuha, Tidore, dan Jailolo, dan Tobelo. Di antara *afdeeling* ini sendiri hanya Labuha yang memiliki pejabat *hoofd afdeeling* atau pimpinan *afdeeling*, sedangkan sisanya termasuk ibukota kesultann Tidore merupakan satuan unit-unit militer.

Pada tahun 1866, Maluku Utara secara resmi diberi status sebagai Karesidenan dengan Ternate sebagai ibukotanya. *Gouvernement* Maluku di Ambon lambat laun dihapus, dan tanggung jawab pemerintahan langsung kepada pemerintahan di Batavia. Hal yang patut diperhatikan adalah pembagian *afdeeling* pada masa reformasi menyerupai pemekaran daerah dari beberapa daerah setingkat kabupaten, meskipun pada perkembangannya di era reformasi beberapa kabupaten baru kemudian menjadi otonom terlepas dari kabupaten induk dari wilayah-wilayah yang serupa dengan *afdeeling* lama. Beberapa pembagian tersebut adalah *afdeeling* Jailolo yang wilayahnya kini sama persis dengan Kabupaten Halmahera Barat, *afdeeling* Tobelo yang kini menjadi Kabupaten Halmahera Utara, *afdeeling* Labuha yang menjadi Kabupaten Halmahera Selatan, *afdeeling* Tidore yang menjadi wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dengan beribukota Tidore di masa Orde Baru dan kemudian pecah menjadi 3 kabupaten pada masa reformasi, dan *afdeeling* Sula yang pada masa reformasi menjadi Kabupaten Kepulauan Sula kemudian terpecah kembali dengan hadirnya Kabupaten Taliabu.

Selain itu pembagian distrik di antara *afdeeling* lebih menyerupai kecamatan di masa reformasi. Sekiranya dalam tulisan ini hanya beberapa distrik saja yang menjadi perhatian yaitu distrik Weda yang di masa reformasi menjadi wilayah Kabupaten Hamahera Tengah, distrik Maba yang menjadi wilayah Kabupaten Halmahera Timur, dan distrik Taliabu yang di masa reformasi menjadi Kabupaten Taliabu. Tidak hanya itu pada tahun 1848 sebelumnya Belanda mewacanakan pemindahan ibukota karesidenan ke Sofifi karena kondisi pulau Ternate yang rawan bencana letusan gunung berapi. Meskipun tidak pernah terlaksana di masa kolonial, Sofifi saat ini memang ditunjuk sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara yang baru. Oleh karena itu pembagian administrasi tersebut setidaknya memberi gambaran adanya relasi, bahkan dapat dikatakan sebagai fondasi legal antara pembagian administrasi antara masa lalu dengan masa kini.⁹

Dampak Modernisasi Pemerintahan Atas Masyarakat Pedesaan

Bagian ini sendiri merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya. Jika kompetisi klasik antara Kesultaan Ternate dan Tidore selama abad ke 16 hingga 17 berpengaruh pada wilayah persebaran etnis-etnis di Indonesia Timur, dengan pengecualian migrasi masyarakat Tobelo dan Galela ke Hamahera Selatan, maka ada dugaan keberadaan pemerintah kolonial memberi

⁹ F.S.A. de Clercq, *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*. Batavia: E.J. Brill.

dampak atas konsentrasi penduduk dan tumbuhnya pusat pemukiman baru di Maluku Utara. Fenomena tersebut juga yang menjadi landasan atas konsentrasi penduduk dalam periode berikutnya yang berpengaruh hingga saat ini. Akan tetapi saya masih kekurangan beberapa data penting terutama terkait dengan statistik dan bidang kesehatan umum sehingga premis ini masih harus diuji terlebih dahulu ini.

Dampak utama kebijakan kolonial sesungguhnya memiliki pengaruh cukup mendalam di pedesaan baik dalam permasalahan demografis maupun sosio politik terkait dengan paradigma kultural masyarakat pedesaan di tiap-tiap etnis. Ada beberapa kebijakan yang menjadi fokus saya terkait dengan perubahan masyarakat pedesaan. Hal tersebut adalah monetisasi pajak serta penghapusan sistem upeti kerja wajib, dan juga modernisasi pemerintahan melalui pembukaan pelabuhan. Kedua hal ini membawa masyarakat di beberapa pemukiman menjadi terbuka dengan dunia luar karena sebelumnya hubungan antara masyarakat dan dunia luar dimonopoli oleh kesultanan.

Kebijakan pertama, yaitu monetisasi pajak. Pergantian sistem upeti kepada pajak individu dalam bentuk uang dimulai sejak tahun 1880 dan perluasannya kian intensif pada tahun 1885. Oleh karena banyak muncul hambatan dalam penerapan penarikan dan pemanfaatan pajak, pada tahun 1905 pemerintah membentuk komisi pemerintahan yang membawa perluasan pajak secara sistematis dan penghentian segala bentuk upeti terhadap kesultanan.¹⁰ Penyempurnaan sistem pajak uang dalam rangka perluasan kekuasaan kolonial kian disempurnakan melalui kontrak politik pada tahun 1909. Kontrak tersebut menetapkan wewenang pemerintah untuk memungut pajak pada tiap-tiap penduduk. Sejak saat itu kekuasaan Sultan Ternate atas permasalahan keuangan kesultanan terputus.¹¹

Kondisi berbeda terjadi pada Kesultanan Tidore dan Bacan. Di Kesultanan Tidore, pemberlakuan monetisasi pajak pada tahun 1906 dapat dilaksanakan karena kekisruhan politik seputar suksesi tahta dengan meninggalnya Sultan Mayor Amin pada tahun 1905. Hal tersebut justru mengakibatkan kian besarnya peran pemerintah kolonial di Kesultanan Tidore.¹² Di sisi lain, Kesultanan Bacan justru telah melakukan proses modernisasi pemerintahan dengan mengadopsi secara bertahap sistem hukum dan administrasi pemerintahan Eropa pada awal abad ke-20 akibat

¹⁰ MvO Residen W. G. Roos 1909; KV 1905, hal. 111; KV 1908, hal. 69.

¹¹ *Indisch Staatsblad* no. 33, tanggal 6 Februari 1882; KV 1883-84, Bijlage H, hal. 1-6; KV 1910, hal 53-4; Sultan sendiri ternyata tidak begitu suka dengan konversi pajak ini, meskipun sesungguhnya ia mendapatkan sekitar 46% dari hasil yang diperoleh selama pemungutan, dimana 8% diberikan kepada petugas lapangan. De Clercq, *op.cit.*, hal. 105-6; MvO Residen W. G. Roos 1909.

¹² MvO Residen B. J. Haga 1937.

munculnya permasalahan dengan *Batjan Maatschappij* sehingga pemberlakuan pajak uang dapat berlangsung dengan mudah.¹³

Selain monetisasi pajak, kebijakan yang juga mempengaruhi kondisi perekonomian di Karesidenan Ternate adalah penghapusan beberapa kewajiban kerja paksa bagi para kawula Sultan.¹⁴ Penghapusan yang dilaksanakan pada 1880 ini kian efektif sejak tahun 1892 dengan diberlakukannya *herendiensten* (kerja wajib) bagi kepentingan pemerintah. Pada mulanya *herendiensten*, yang menjadi tanggung jawab dari kawula pemerintah yang tinggal di ibukota Ternate dan Labuha, diaplikasikan dalam bentuk penjagaan atau *kerja gardu* untuk keamanan umum, dan setiap pekerja diwajibkan melakukan penjagaan selama 12 hari per tahun. Akan tetapi dengan menghilangnya kerja paksa di Kesultanan menyebabkan para warga Sultan perlahan-lahan mulai dikenakan peraturan kerja wajib untuk pelayanan daerahnya masing-masing. Jenis pekerjaan yang dikenakan pada mereka adalah pemeliharaan keamanan desa, jalan dan jembatan.¹⁵

Kebijakan ketiga ialah pengambilalihan hak pengelolaan pelabuhan oleh pemerintah kolonial. Kebijakan ini sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1882 melalui penghapusan pajak *leo-leo* di Kesultanan Ternate.¹⁶ Sejak tahun 1902, melalui *Besluit* No. 10, tanggal 11 Juli 1902 pengelolaan pelabuhan Ternate sepenuhnya dialihkan kepada pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk memungut bea dan cukai ekspor impor serta pajak berlabuh dan uang pelabuhan serta mengelola pelabuhan dan keamanan pelabuhan di seluruh wilayah Karesidenan Ternate.¹⁷ Selain itu beberapa pelabuhan di daerah juga dibuka seperti pelabuhan Labuha di Bacan, serta beberapa pelabuhan di pulau Ternate seperti Weda, Tobelo, dan Jailolo

¹³ Anak-anak Sultan Bacan telah sejak lama disekolahkan dalam sekolah Belanda. KV 1907, hal. 73; MvO Residen W. G. Roos 1909, reel MvO 2e No. 27.

¹⁴ Kondisi ini diuntungkan dengan adanya epidemi cacar pada tahun 1884, yang memungkinkan administrasi kolonial dapat menjangkau hingga ke pedalaman. KV 1885-86, hal. 26.

¹⁵ MvO W. G. Roos 1909, reel MvO 2e No. 27; KV 1893-94, hal. 28;

¹⁶ Pada tahun yang sama dengan penghapusan pajak ini, telah diputuskan suatu kontrak antara pemerintah kolonial dengan KPM dan *Nederlandsch-Indie Stoomvaartmaatschappij* Khusus bagi *Nederlandsch-Indie Stoomvaartmaatschappij* merupakan perusahaan pelayaran yang rute ke Hindia bagian Timur, dimana wilayah Ternate di dalamnya, mendapatkan subsidi dari negara. Bahkan sejak tahun 1884 subsidi dilipatgandakan karena kerugian yang diderita pada jalur ini. Pelayaran menuju Ternate dimasukkan dalam jalur pelayaran IIIa (Surabaya-Makasar-Pare-Pare-Palosbaai-Tontoli-Amurang-Menado-Gorontalo-Ternate-Bacan-Buru-Amboina-Banda-Amboina-Makasar-Surabaya) dan IIIb (Surabaya-Makasar-Amboina-Banda-Amboina-Buru-Bacan-Ternate-Gorontalo-Menado-Amurang-Tontoli-Palosbaai-Pare-Pare-Makasar-Surabaya) yang keduanya memakan waktu 2 bulan. Kunjungan pelayaran kapal api pertama dari perusahaan ini terjadi pada 15 Mei 1882. Mr. T. H. Der Kinderen, "Verslag betreffende de Invoering van de nieuwe regelingen van het rechtwezen in de gewesten Celebes en onderhoorigheden, Timor, Menado, Amboina, en Ternate" dalam KV 1883-84, Bijl. H; "Overzicht Betreffende de ten laste van Nedelandsch-Indie Gesubsidieerde Stoompaketaartdiensten der Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij, op 1 Mei 1883" dalam KV 1883-84, Bijl. R; KV 1884, hal. 23; KV 1884/1885, hal. 23.

¹⁷ KV 1903 hal. 152.

Selain itu ada pula tentang penghapusan perbudakan dan penghancuran operasi bajak laut di Maluku Utara, kebijakan tersebut memberi rasa aman di antara masyarakat pedesaan. Hal ini karena secara perlahan menghentikan ancaman adanya perompakan dan penculikan di desa yang kemudian dijadikan budak karena budak masih merupakan komoditi strategis dan mahal. Dukungan dan koordinasi militer Belanda, serta kebijakan satu pintu pemerintah kolonial lebih memungkinkan untuk menciptakan keamanan di desa-desa dan mendorong mobilisasi ekonomi. Hal ini berjalan beriringan dengan masuknya kapitalisasi melalui perusahaan terutama perusahaan terbesar *Batjan Archipel Maatschappij* (BAM) yang sejak akhir abad ke-19 secara rutin berkeliling ke seluruh Halmahera guna membeli produk lokal hasil hutan dan kebun milik penduduk.

Perubahan mendasar dari berbagai kebijakan modernisasi pemerintahan dan kebijakan pemerintah kolonial di Maluku Utara tidak hanya membawa masyarakat pedesaan ke dalam dunia baru, melalui lepasnya ikatan patron-klien antara sultan dan rakyatnya, peredaran luas barang konsumsi di pedesaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat pedesaan dalam kerangka ekonomi global, tetapi juga berimplikasi pada perubahan sosial di antara masyarakat pedesaan. Hal ini berarti bahwa berbagai pembekuan kesultanan Ternate di tahun 1906 dan Tidore di tahun 1914 dengan menunjukkan adanya upaya pembentukan negara nasional Hindia Belanda dan eliminasi dualism politik pada pemerintah swapraja atau *zelfbestuuren*, sesungguhnya tidak hanya dimaknai secara politik semata, tanpa memperhatikan kajian pedesaan yang terabaikan.

Meskipun demikian perlu kiranya dilakukan sebuah pemahaman mendalam mengenai persoalan demografis pedesaan di Maluku Utara pada masa awal modernisasi di masa kolonial Belanda di sepanjang abad ke-20. Walau banyak kajian lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai ibukota Ternate, baik urbanisasi hingga mobilisasi sosial, sesungguhnya mobilitas geografis masyarakat pedesaan di Maluku Utara di luar ibukota Ternate jauh lebih massif daripada urbanisasi kota Ternate di sepanjang periode kolonial ini. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa faktor keamanan dan keterbatasan sumber ekonomi di tingkat lokal menyebabkan banyak warga di pedesaan melakukan mobilitas geografis ke sumber-sumber daya terbaik dari hutan-hutan yang belum terjamah pada periode kolonial tersebut. Mobilitas geografis dari ketiga etnis ini sendiri akan dirasakan dampaknya pada morfologi sosial Maluku Utara di masa kini. Meskipun tidak ada sensus demografis berdasar identifikasi etnis, ketiga etnis tersebut memiliki ruang diaspora terluas di antara etnis-etnis lainnya di Maluku Utara. Tidak hanya itu, konstelasi politik lokal di Maluku Utara berkenaan dengan demokratisasi pemilihan kepala daerah langsung khususnya di tingkat provinsi menunjukkan bahwa ketiga etnis tersebut merupakan kekuatan politik terbesar mengingat besarnya dukungan jumlah suara karena sesungguhnya hal itu adalah perspektif sosio kultural masing-masing daerah dalam melihat makna demokratisasi pasca reformasi, meskipun perbincangan dan kritik atas hal ini dapat dilakukan di ruang akademis.

Penutup

Uraian ringkas di atas tentu hanya merupakan bagian kecil dari luasnya fenomena kesejarahan di Maluku Utara. Diyakini masih ada ribuan fenomena historis terkait relasinya dengan kekinian yang tersembunyi di tumpukan data-data kolonial. Meskipun demikian, saya berharap dengan uraian ini setidaknya mampu menempatkan sejarah Maluku Utara sesuai porsi dan kedudukannya dengan melihat Maluku Utara sebagai suatu kesatuan sosial dan kultural di setiap elemen sosialnya. Banyaknya tema penelitian kesejarahan berkenaan dengan kekuasaan kolonial dan kesultanan seperti ibukota, kesultanan, peperangan, serta berbagai peristiwa besar lainnya, seolah-olah mempersonifikasikan masyarakat pribumi sebagai kesultanan semata sehingga menciptakan bias kuasa, dan tidak memberi ruang bagi masyarakat umum sebagai kelompok terbesar dari unist sosial di Maluku Utara yang justru menjadi penggerak kontinuitas sejarah antara periode kolonial dan masa kini. Dengan melepaskan bias kuasa ini, setidaknya sejarah Maluku Utara dapat melihat hal penting dalam aspek-aspek sosial dan budaya yang sangat berguna dan bermanfaat terkait dengan realitas kekinian, daripada hanya sekadar membicarakan menang dan kalah, baik dan jahat, ataupun pengagungan symbol-simbol masa lalu sebagai kejayaan secara tidak proposional yang kurang berfaedah bagi kekinian.

Uraian di atas juga memberi ruang guna melihat kekuasaan kolonial dalam proporsinya. Saya menganggap bahwa selama sumber sejarah tersebut memiliki kredibilitas tentu sangat layak untuk diuji secara metodologis guna menjadi fakta sejarah. Dampak dari kehadiran kolonial, khususnya intensifikasi kolonial di Maluku Utara sejak pertengahan abad ke-19, tidak hanya berperan sebagai 'isi' museum dari bangunan yang terasa sepi, seram, suram, dan membosankan tanpa makna ataupun kisah dari material yang ditampilkan, tetapi juga memberi pemahaman mengapa kontinuitas sejarah itu menjadi alasan dari berbagai fenomena kekinian. Bagi saya pribadi poin kedua tentu merupakan relevansi tentang mengapa mempelajari sejarah diperlukan. Oleh karena itu, menurut saya pemahaman dan penelitian sejarah Maluku Utara pada masa kolonial di antara kalangan akademisi harus memiliki perspektif yang berbeda dalam konteks historiografi kritis sebagaimana tradisi akademis.

DAFTAR PUSTAKA

ANRI. 1909. *Ternate: MvO J. H. Tobias (1857) dan C. Bosscher (1859)* (Jakarta: ANRI, 1980).

Barreta, J. M. 1917. *Halmahera en Morotai*. Batavia: N. V. Boekhandel

Barraud, C. & J. Platenkamp, "Rituals and the comparison of societies" dalam *BKI, Rituals and Socio-Cosmic Order in Eastern Indonesian Societies, Part II Maluku*, No. 146, 1990, Leiden.

Clercq, F. S. A. 1890. *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*. Batavia: E.J. Brill.

Fraassen, Ch. F. van, 1987, *Ternate, De Molukken en De Indonesische Archipel, Van Soa Organisatie en Vierdeling: Een Studie van Traditionele Samenleving en Cultuur en Indonesia*, Deel I & II, Disertasi Universiteit Leiden

Indisch Staatsblad no. 33, tanggal 6 Februari 1882

Kinderen, Mr. T. H., 1884. "Verslag betreffende de Invoering van de nieuwe regelingen van het rechtwezen in de gewesten Celebes en onderhoorigheden, Timor, Menado, Amboina, en Ternate" dalam *Overzicht Betreffende de ten laste van Nedelandsch-Indie Gesubsidieerde Stoompaketvaartdiensten der Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij, op 1 Mei 1883*. Tanpa Kota, Tanpa Penerbit.

Koloniaal Verslag 1883-84, 1884, 1884/1885, 1885/86, 1877, 1893-94, 1903, 1905, 1907, 1908

MvO Residen W. G. Roos 1909; MvO Residen B. J. Haga 1937

Rizzo, Sussana Grazia. 2004. *From Paradise Lost to Promise Land, Christianity and the Rise of Papuan Nationalism*, Disertasi University of Wollongong.

Visser, L. E. (ed). 1994. *Halmahera and Beyond, Social Science Research in Moluccas*. Leiden: KITLV